

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, H., & Seftianova, R. (2013). Pengaruh Kualitas DIPA dan Akurasi Perencanaan Kas Terhadap Kualitas Penyerapan Anggaran Pada Satker Wilayah KPPN Malang. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 4(1), 75–84.
- Aini, Q. (2014). *Evaluasi dan Strategi Peningkatan Kinerja Studi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY*. Universitas Gadjah Mada.
- Andrews, R., Boyne, G. A., Law, J., & Walker, R. M. (2012). *Strategic Management and Public Service Performance* (1 ed.). Hampshire: Palgrave Macmillan.
- Aristiowati, I. (2015). *Evaluasi Penganggaran dan Pelaksanaan Anggaran Organisasi Sektor Publik (Studi Pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)*. Universitas Gadjah Mada.
- Arti kata strategi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. (2016).
- Asmadewa, I. (2007). *Faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan implementasi anggaran berbasis kinerja : Studi pada pemerintah pusat*. Universitas Gadjah Mada.
- Ayi, R., Warsito, U., & Ratminto. (2006). Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman = Implementation of Performance-Based Budget in Sleman Regency. *Sosiosains 2006*, XIX(1).
- Bryson, J. M. (2011). *Strategic Planning For Public and Nonprofit Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement* (4 ed.). San Francisco: John Woley & Sons.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (3 ed.). California: Sage Publications.
- Daimul Abror, M. (2007). Relevansi Penerapan New Public Management di Negara Berkembang (Perbandingan kasus di Singapura dan Indonesia). Diambil 22 September 2016, dari <http://jurnal.yudharta.ac.id/wp-content/uploads/2014/11/31.pdf>
- Dwi Siswanto, A., & Lestari Rahayu, S. (2010). Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian/Lembaga TA 2010. Diambil 27 September 2016, dari http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/artikeldanopini/Kementerian_embaga.pdf
- Friedman, M. (2009). *Trying Hard Is Not Good Enough How to Produce Measurable Improvements for Customers and Communities* (1 ed.). FPSI Publishing.
- Giantini, D. (2016). *Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Terhadap Penerapan Good Governance (Suatu Studi pada Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri Wilayah Bandung)*. Universitas Pasundan.
- Gruening, G. (2001). Origin and theoretical basis of New Public Management. *International Public Management Journal*, 4, 1–25.

- Hennink, M., Hutter, I., & Bailey, A. (2011). *Qualitative Research Methods*. London: Sage Publications.
- Herriyanto, H. (2012). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di Wilayah Jakarta*. Universitas Indonesia.
- Hood, C. (1995). The “New Public Management” In The 1980s : Variations On a Theme. *Accounting, Organizations and Society*, 20, 93–109.
- Indrawati, N. (2010). Penyusunan Anggaran dalam Era New Public Management: Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 10(September), 176–193.
- Kementerian Keuangan. (2014). *Pedoman penataan arsitektur dan informasi kinerja dalam rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga*. Jakarta.
- Kementerian Keuangan, & Bappenas. (2009). Buku 2 Pedoman Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK). Diambil 24 Mei 2016, dari http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/buku_2.pdf
- Kurrohman, T. (2013). Evaluasi Penganggaran Berbasis Kinerja Melalui Kinerja Keuangan Yang Berbasis Value for Money di Kabupaten/Kota di Jawa Timur. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 5(1), 1–11.
- Longo, P. J. (2002). The Performance Blueprint: An Integrated Logic Model Developed To Enhance Performance Measurement Literacy: The Case of Performance-Based Contract Management.
- Micheli, P., & Neely, A. (2010). Performance Measurement in the Public Sector in England: Searching for the Golden Thread. *Public Administration Review*, 591–600.
- Parulian, T. (2014). *Evaluasi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (Studi pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral)*. Universitas Gadjah Mada.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 15/PMK.02/2016 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2016 (2016). Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (2011). Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 02 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (2016). Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama (2008). Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian/Lembaga (2004). Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian

Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (2006). Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (2010). Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (2014). Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri (2015). Republik Indonesia.

Rahayu, S., Ludigdo, U., & Affandy, D. (2007). Studi Fenomenologis Terhadap Proses Penyusunan Anggaran Daerah Bukti Empiris Dari Satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Provinsi Jambi. *Simposium Nasional Akuntansi*, 1–22.

Rifai, A., Adha Inapty, B., & Pancawati, S. (2016). Analisis Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Daya Serap Anggaran (Studi Empiris Pada SKPD Pemprov NTB). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 11(1), 1–10.

Sadjiarto, A. (2000). Akuntabilitas Dan Pengukuran Kinerja. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 2(2), 138–150.

Suprayogi. (2015). *Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja: (Studi pada Satuan Kerja Pusat Survei Geologi)*. Universitas Gadjah Mada.

Undang-Undang no. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (2003). Indonesia.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (2004). Republik Indonesia.

Utari, N. (2009). *Studi Fenomenologis Tentang Proses Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Kabupaten Temanggung*. Universitas Diponegoro.

Wibawa, S. (2002). Penjajagan Awal Penerapan New Public Management dalam Administrasi Kabupaten. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 5(3), 361–378.

Wijayanti, A. W., Rahman, M., Muluk, K., & Nurpratiwi, R. (2012). Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja di Kabupaten Pasuruan. Diambil 29 September 2016, dari <http://wacana.ub.ac.id/index.php/wacana/article/view/237>

Wyatt Knowlton, L., & C. Phillips, C. (2013). *The Logic Model Guidebook Better Strategies for Great Results* (2 ed.). California: Sage Publications.